



LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT DJPB TRIWULAN II TAHUN 2024

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
TAHUN 2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 dapat terselesaikan.

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 ini merupakan wujud pertanggungjawaban keberhasilan atas pelaksanaan program dan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang dapat diukur secara kuantitatif maupun kualitatif dengan menggunakan indikator kinerja sebagai alat ukurnya. Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam mewujudkan LKj ini, dengan harapan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya untuk meningkatkan pembangunan perikanan budidaya yang berkelanjutan di masa mendatang semakin meningkat, disamping dapat memberikan informasi dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta sebagai evaluasi kinerja untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan selanjutnya.

Jakarta, 19 Juli 2024

Sekretaris Ditjen Perikanan Budidaya,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
LAMPIRAN	vii
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Maksud dan Tujuan	4
1.3. Tugas dan Fungsi	4
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)	5
1.5. Kendala dan Permasalahan	9
1.6. Sistematika Penyajian Laporan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	11
2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020 - 2024	11
2.2. Sasaran Strategis	12
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	12
2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN	16
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	16
3.2. Analisis Capaian Kinerja	19
SK.01 Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	19
IKSK.1 Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB	19
IKSK.2 Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	20
IKSK.3 Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	22
IKSK.4 Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	23

IKSK.5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya	25
IKSK.6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	26
IKSK.7	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	28
IKSK.8	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	30
IKSK.9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	32
IKSK.10	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	33
IKSK.11	Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	34
IKSK.12	Persentase Dokumen Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya	36
IKSK.13	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	38
IKSK.14	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen Perikanan Budi Daya dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	40
IKSK.15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya	41
IKSK.16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya	42
IKSK.17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	43
IKSK.18	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	45
IKSK.19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	46
IKSK.20	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	47
IKSK.21	Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya	48
IKSK.22	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB	49
IKSK.23	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri	51
3.3.	Akuntabilitas Keuangan.....	53

BAB IV PENUTUP..... 54

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024	16
Tabel 2. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat DJPB	20
Tabel 3. Capaian Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA.....	21
Tabel 4. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	22
Tabel 5. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi.....	24
Tabel 6. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB	26
Tabel 7. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budidaya.....	27
Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB.....	29
Tabel 9. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	31
Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	32
Tabel 11. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	34
Tabel 12. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang menerapkan manajemen pengetahuan yang terstandar	35
Tabel 13. Capaian Persentase Dokumen Kerja Sama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budidaya	37
Tabel 14. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.....	39
Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	40
Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya	41
Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya	43
Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	44
Tabel 19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	45

Tabel 20. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	47
Tabel 21. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya.....	48
Tabel 22. Capaian Persentase Layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya.....	49
Tabel 23. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB .	50
Tabel 24. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri..	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Daya	5
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan	6
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu	7
Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum	8
Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan.....	8
Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024	11
Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024	12
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024	13
Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB	15
Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024	53
Gambar 11. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2023	53

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 merupakan laporan capaian kinerja atas target yang telah dicapai dalam kurun waktu April sampai Juni Tahun 2024 dan juga merupakan wujud dari pertanggungjawaban Setditjen Perikanan Budi Daya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya selama triwulan II tahun 2024. Mengacu pada Rancangan Teknokratis Rencana Strategis (Renstra) Perikanan Budidaya Tahun 2020- 2024 maupun Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024, maka Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat Direktorat Jenderal (Setditjen) Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 ini memuat rencana kinerja beserta target yang ingin dicapai serta pengukuran pencapaian sasaran termasuk keberhasilan dan kendala pelaksanaan kegiatan di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya selama periode triwulan II tahun 2024.

PK Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024 berisi 1 (satu) Sasaran Kegiatan (SK) dengan 23 (dua puluh tiga) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana penjelasan berikut:

1. Sasaran Strategis (SK.01): Tatakelola Pemerintahan yang Baik di Lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya, yaitu:

- 1) **IKSK.1** Nilai PM SAKIP Sesditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 82 (Nilai);
- 2) **IKSK.2** Persentase Pelaku Usaha budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen), dimana target pada triwulan II sebesar 40% dengan capaian pada triwulan II sebesar 45,77% (Persen);
- 3) **IKSK.3** Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 4) **IKSK.4** Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen);
- 5) **IKSK.5** Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 85 (Indeks), dimana target pada triwulan II sebesar 80 dengan capaian pada triwulan II sebesar 83,18 (Indeks);
- 6) **IKSK.6** Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Indeks);
- 7) **IKSK.7** Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 3 (Persen);
- 8) **IKSK.8** Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilaian Internal KKP, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 76 (Unit);
- 9) **IKSK.9** Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah

100 (Persen), dimana target pada triwulan II sebesar 40% dengan capaian pada triwulan II sebesar 75% (Persen);

- 10) **IKSK.10** Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 65 (Persen);
- 11) **IKSK.11** Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 94 (Persen), dengan capaian pada triwulan II sebesar 133,33%;
- 12) **IKSK.12** Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 90 (Persen), dimana target pada triwulan II sebesar 30% dengan capaian pada triwulan II sebesar 83,33% (Persen);
- 13) **IKSK.13** Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 86 (Persen), dengan capaian pada triwulan II sebesar 100% (Persen);
- 14) **IKSK.14** Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 100 (Persen);
- 15) **IKSK.15** Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen), dengan capaian pada triwulan II sebesar 107,84%(Persen);
- 16) **IKSK.16** Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 93,76 (Nilai), dengan capaian pada triwulan II sebesar 106,95%(Persen);
- 17) **IKSK.17** Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 18) **IKSK.18** Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 86 (Nilai);
- 19) **IKSK.19** Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 20) **IKSK.20** Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 21) **IKSK.21** Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 80 (Persen);
- 22) **IKSK.22** Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SPIP Unit DJPB, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 3,3 (Nilai); dan
- 23) **IKSK.23** Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri, dengan target nilai yang ditetapkan adalah 75 (Persen).

Perbaikan atas ketercapaian kinerja yang ditetapkan pada triwulan berikutnya adalah sebagaimana berikut:

- 1) Memperbaiki peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dengan mengadakan bimbingan teknis atau sosialisasi tata cara pengisian PM SAKIP pada aplikasi kinerja KKP;
- 2) Akan dilakukan monitoring secara berkala dengan harapan seluruh ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat dinilai hasil kerja oleh pimpinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan;
- 3) Akan dilakukan koordinasi dengan Unit Kerja agar dapat mengirimkan data dukung tepat waktu terkait Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Oleh Tim Penilai Internal;
- 4) Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu *automatic adjustment* serta revisi lembar iii dipa yang disesuaikan dengan perubahan anggaran;
- 5) Berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku penjamin kualitas SPIP lingkup KKP dalam penilaian mandiri;

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 merupakan wujud transparansi pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya periode Triwulan II Tahun 2024 yang disusun berdasarkan Rencana Strategis Budidaya tahun 2020 – 2024 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 beserta Indikator Kinerja Utama Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 adalah Peraturan Presiden No.29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja yaitu: (i) untuk menyajikan pertanggungjawaban dan informasi mengenai rencana dan capaian kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Setditjen Perikanan Budi Daya dan (ii) sebagai bahan evaluasi atas keberhasilan maupun kegagalan serta permasalahan yang terkait dengan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya sehingga dapat dievaluasi dan ditindaklanjuti dengan mengambil langkah-langkah perbaikan.

1.3. Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, maka Setditjen Perikanan Budi Daya mempunyai kedudukan, tugas, dan fungsi sebagai berikut:

1. Kedudukan

Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan salah satu unit kerja Eselon II yang dipimpin oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya.

2. Tugas

Sekretariat Direktorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan direktorat jenderal.

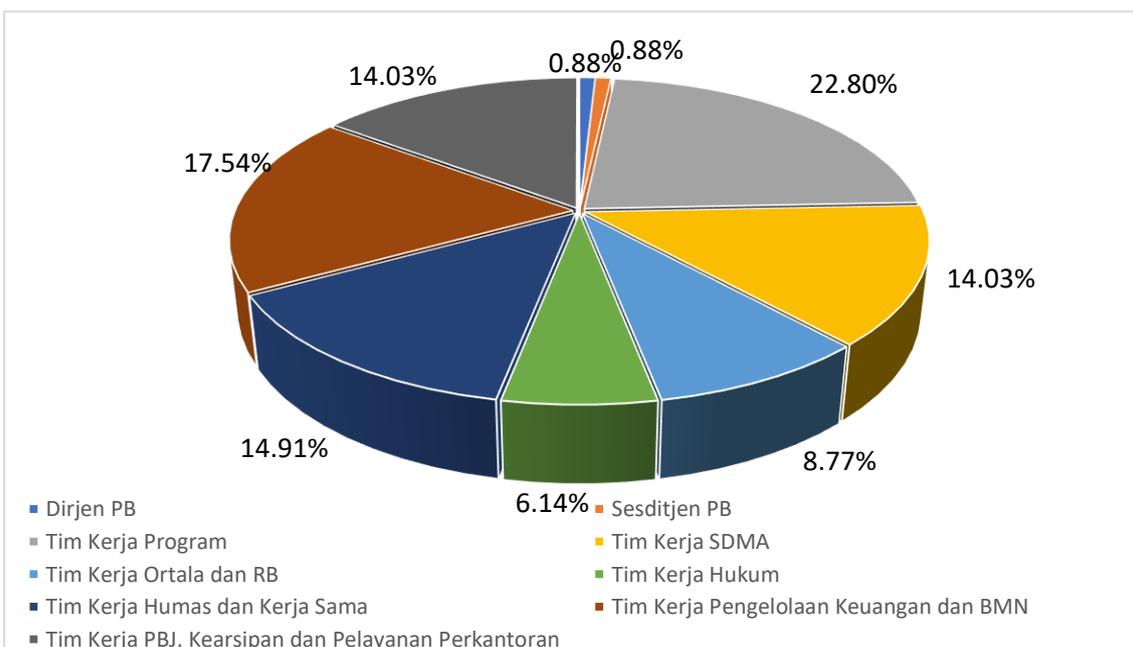
3. Fungsi

Setditjen Perikanan Budi Daya menyelenggarakan fungsi:

- 1) koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan data dan kinerja, penyiapan bahan pimpinan, serta pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan;
- 2) koordinasi dan pelaksanaan urusan administrasi sumber daya manusia aparatur, penataan organisasi dan tata laksana, serta fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi;
- 3) koordinasi penyusunan dan pembahasan rancangan peraturan perundang-undangan, pelaksanaan advokasi hukum, dan pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum;
- 4) koordinasi dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan kerja sama; dan
- 5) koordinasi dan pelaksanaan urusan keuangan, barang milik negara, dan ketatausahaan.

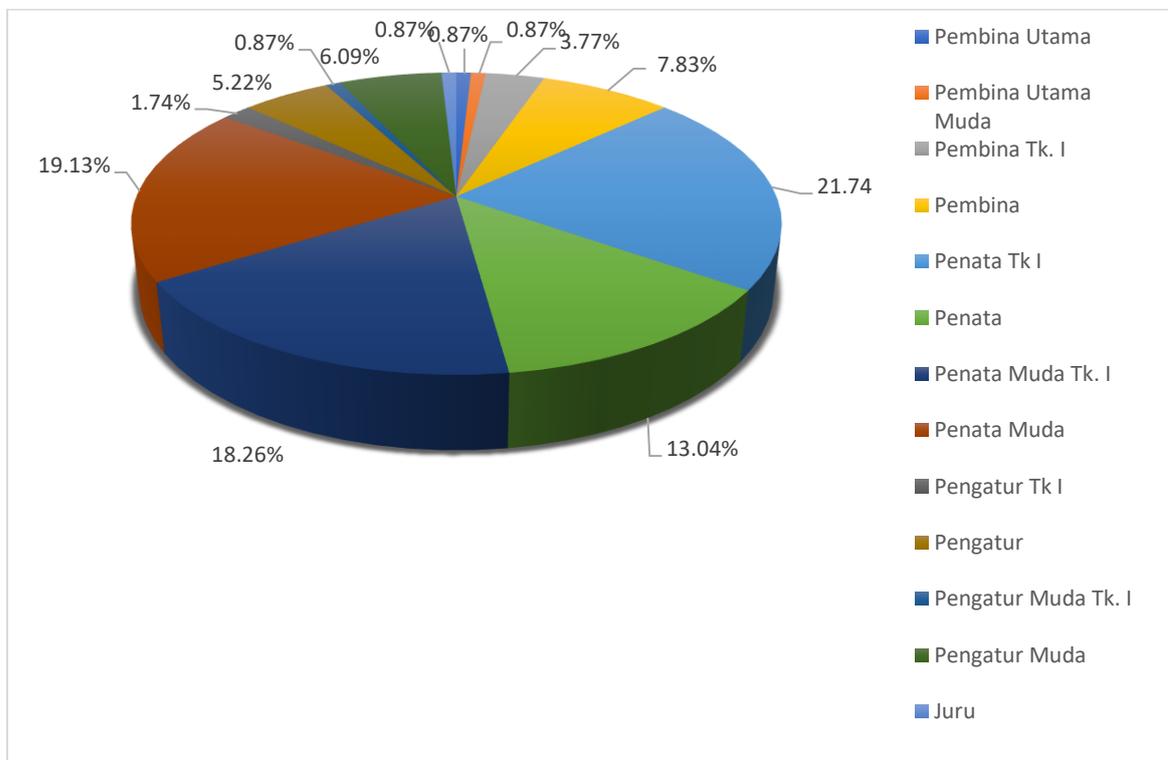
1.4. Keragaan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 berjumlah 114 orang, terdiri dari Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya (Dirjen PB), Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya (Sesditjen PB) dan 112 orang pegawai tersebar pada 7 Tim Kerja lainnya, yaitu: (i) Tim Kerja Program berjumlah 26 orang; (ii) Tim Kerja SDMA berjumlah 16 orang; (iii) Tim Kerja Ortala dan RB berjumlah 10 orang; (iv) Tim Kerja Hukum berjumlah 7 orang; (v) Tim Kerja Humas dan Kerja Sama berjumlah 17 orang; (vi) Tim Kerja Pengelolaan Keuangan dan BMN berjumlah 20 orang, dan (vii) Tim Kerja PBJ, Kearsipan dan Pelayanan Perkantoran berjumlah 16 orang.



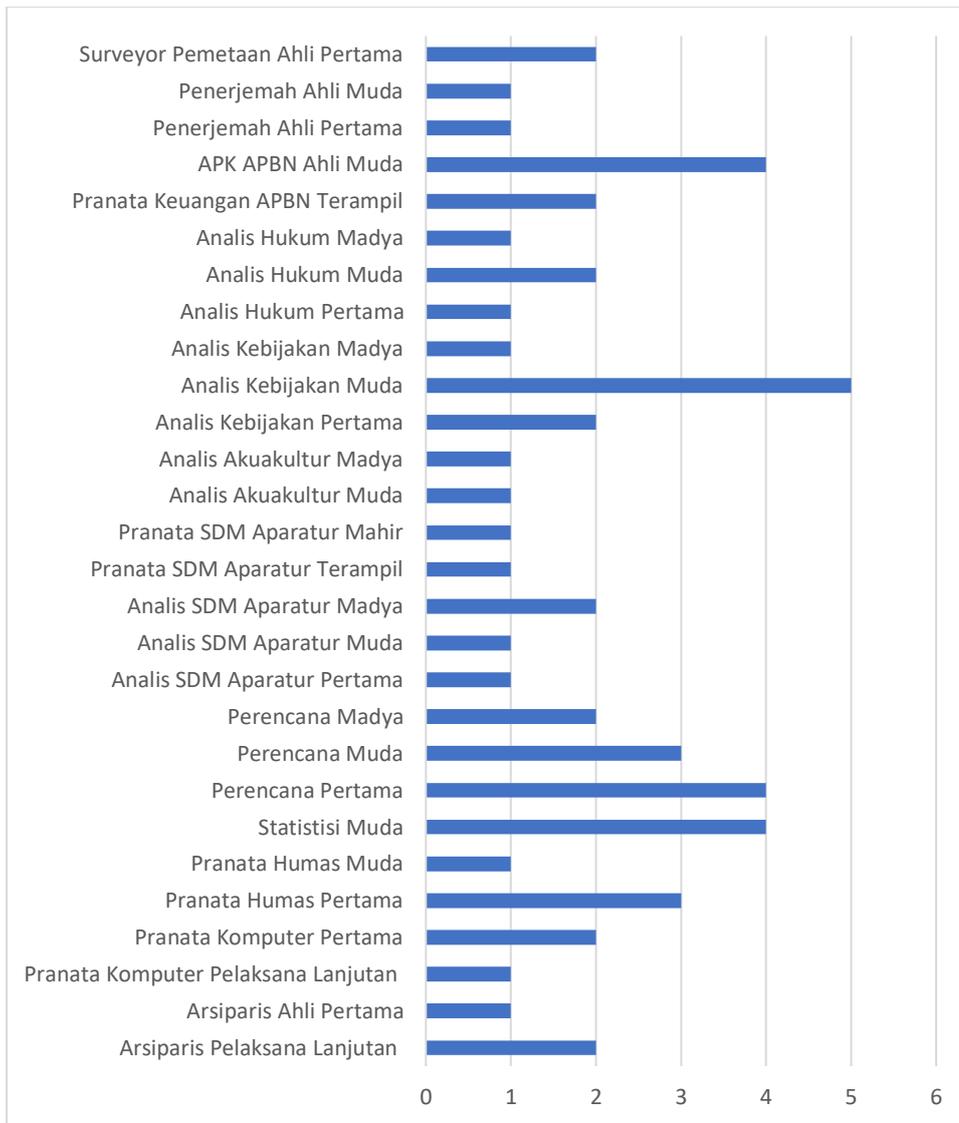
Gambar 1. Keragaan SDM Setditjen Perikanan Budi Baya

Berdasarkan pangkat/golongan ruang, pegawai pada Setditjen Perikanan Budi Daya terdiri dari: (i) Pembina Utama berjumlah 1 orang; (ii) Pembina Utama Muda berjumlah 2 orang; (iii) Pembina Tk. I berjumlah 2 orang; (iv) Pembina berjumlah 11 orang; (v) Penata Tk. I berjumlah 25 orang; (vi) Penata berjumlah 16 orang; (vii) Penata Muda Tk. I berjumlah 20 orang; (viii) Penata Muda berjumlah 20 orang; (ix) Pengatur Tk. I berjumlah 2 orang; (x) Pengatur berjumlah 7 orang; (xi) Pengatur Muda Tk. I berjumlah 4 orang; (xii) Pengatur Muda berjumlah 3 orang; dan (xiii) Juru berjumlah 1 orang.



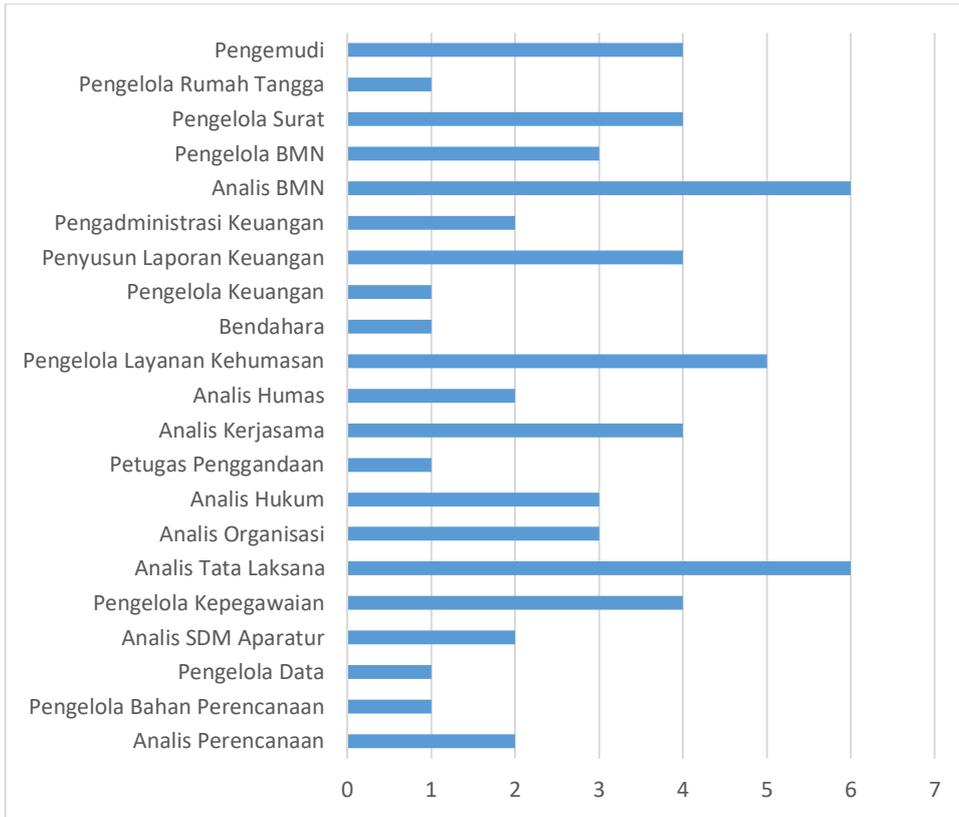
Gambar 2. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Pangkat/Golongan

Sedangkan pejabat fungsional tertentu pada Setditjen Perikanan Budi Daya berjumlah 37 orang yang terdiri dari Arsiparis Pelaksana Lanjutan, Arsiparis Ahli Pertama, Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Pertama, Pranata Humas Ahli Muda, Statistisi Ahli Muda, Perencana Ahli Pertama, Perencana Ahli Muda, Perencana Ahli Madya, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Muda, Analis SDM Aparatur Ahli Madya, Pranata SDM Aparatur Terampil, Pranata SDM Aparatur Mahir, Analis Akuakultur Ahli Muda, Analis Akuakultur Ahli Madya, Analis Kebijakan Ahli Pertama, Analis Kebijakan Ahli Muda, Analis Kebijakan Ahli Madya, Analis Hukum Ahli Pertama, Analis Hukum Ahli Muda, Analis Hukum Ahli Madya, Pranata Keuangan APBN, APK APBN Pertama, APK APBN Muda, Penerjemah Ahli Pertama, Penerjemah Ahli Muda, Surveyor Pemetaan Ahli Pertama.



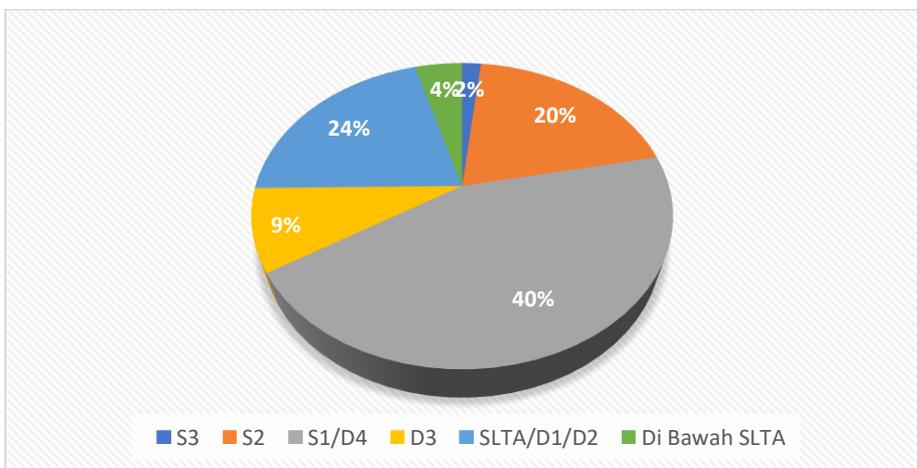
Gambar 3. Keragaan Pejabat Fungsional Tertentu

Pejabat Fungsional Umum pada Setditjen Perikanan Budidaya berjumlah 59 orang, terdiri dari Analisis Perencanaan, Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Pengelola Bahan Perencanaan, Pengelola Data, Analisis SDM Aparatur, Pengelola Kepegawaian, Analisis Tata laksana, Analisis Organisasi, Analisis Hukum, Petugas Penggandaan, Analisis Kerjasama, Analisis Humas, Pengelola Layanan Kehumasan, Bendahara, Pengelola Keuangan, Pengadministrasi Keuangan, Analisis BMN, Pengelola BMN, Pengelola Surat, Pengelola Rumah Tangga, dan Pengemudi.



Gambar 4. Keragaan Pejabat Fungsional Umum

Sementara itu pengelompokan menurut jenjang pendidikannya, pegawai pada Setditjen Perikanan Budidaya terdiri dari: (i) Lulusan S-3 berjumlah 2 orang; (ii) Lulusan S-2 berjumlah 23 orang; (iii) Lulusan S-1/D-4 berjumlah 52 orang; (iv) Lulusan D-3 berjumlah 10 orang; (v) Lulusan D-2/D-1/SLTA berjumlah 23 orang; dan (vi) Lulusan di bawah SLTA sebanyak 4 orang.



Gambar 5. Persentase Jumlah Pegawai Setditjen Perikanan Budi Daya Berdasarkan Jenjang Pendidikan

1.5. Kendala dan Permasalahan

Permasalahan yang dihadapi adalah:

1. Dalam hal sumber daya manusia di lingkup perikanan budidaya, yang secara umum meliputi perubahan struktur organisasi yang dinamis dan kreativitas sumberdaya manusia untuk pengembangan organisasi masih rendah,
2. Dokumen SAKIP yang disajikan masih belum lengkap dan kurangnya koordinasi dalam melakukan verifikasi capaian kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP secara online,
3. Masih terdapat ASN yang kurang teliti dalam mengisi hasil kerja pada aplikasi e-kinerja BKN, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dinilai tepat waktu oleh pimpinan,
4. Unit Kerja belum disiplin dalam melakukan update dokumen data dukung Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Oleh Tim Penilai Internal KKP sehingga simulasi nilai yang diperoleh pada saat asistensi (pendampingan) belum optimal,
5. Perubahan revisi anggaran pada nilai kinerja anggaran dampak dari pagu anggaran yang diblokir dan *automatic adjustment* oleh Kementerian Keuangan, dan
6. Terputusnya website penilaian yang dimiliki BPKP dalam penialain Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB.

1.6. Sistematika Penyajian Laporan

LKj Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024 ini menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024, yang diketahui dari realisasi capaian target indikator kinerja masing-masing sasaran strategis. Dari hasil analisis capaian kinerja terhadap perencanaan kinerja yang sudah ditetapkan, maka akan dapat diketahui permasalahan yang ada dan tindak lanjutnya demi perbaikan kinerja di masa mendatang.

Sistematika penyajian LKj Tahunan Setditjen Perikanan Budi Daya tersebut adalah sebagai berikut:

1. **Bab I, Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat mengenai Latar Belakang, Maksud dan Tujuan, Tugas dan Fungsi, Keragaan SDM, Kendala dan Permasalahan serta Sistematika Penyajian Laporan.
2. **Bab II, Perencanaan Kinerja**, menguraikan tentang Rencana Strategis, Sasaran Strategis, PK Setditjen Perikanan Budi Daya dan Pengukuran Capaian Kinerja.
3. **Bab III, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan**, menyajikan capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya untuk setiap SK sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk pencapaian tersebut serta akuntabilitas keuangan.
4. **Bab IV, Penutup**, menjelaskan kesimpulan atas capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya serta perbaikan yang akan dilakukan terhadap permasalahan yang ada guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.

5. **Lampiran**, menyajikan dokumen pendukung laporan kinerja yang diperlukan sebagai penjelasan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis (Renstra) Budidaya Tahun 2020-2024

Berdasarkan Rancangan Teknokratis Renstra Perikanan Budidaya 2020-2024, Ditjen Perikanan Budi Daya melaksanakan program Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Budidaya yang Berkelanjutan. Arah kebijakan pembangunan perikanan budidaya dilakukan dengan mempertimbangkan pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial. Fokus kebijakan bertumpu pada 4 aspek, yaitu: (i) teknologi produksi, melalui inovasi teknologi untuk meningkatkan nilai produksi dan nilai tambah; (ii) sosial ekonomi, melalui keterlibatan semua stakeholder dalam peningkatan kesejahteraan pelaku usaha; (iii) keberlanjutan lingkungan, melalui aktivitas perikanan budidaya ramah lingkungan yang mempertimbangkan daya dukung lingkungan; (iv) berorientasi pasar, artinya perikanan budidaya memproduksi komoditas unggulan yang berorientasi pada permintaan pasar. Pada akhirnya, pembangunan perikanan budidaya diharapkan dapat berperan penting untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan, memenuhi ketahanan pangan nasional, dan peningkatan ekspor produk.



Gambar 6. Arah Kebijakan Pembangunan Perikanan Budidaya 2020-2024

Kebijakan pembangunan perikanan budidaya dikelompokkan menjadi tiga kelompok strategi yang meliputi Pengelolaan Kawasan Berkelanjutan, Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, dan Peningkatan Kesejahteraan Pembudidaya Ikan. Kelompok strategi tersebut kemudian masing-masing dijabarkan dalam strategi, sebagaimana disajikan pada Gambar 7.



Gambar 7. Arah Kebijakan dan Strategi Perikanan Budidaya 2020-2024

2.2. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan perikanan budidaya merupakan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya sebagai suatu *outcome/ impact* dari program yang dilaksanakan. Sasaran Strategis Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya tahun 2020-2024 adalah Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Dalam mendukung pelaksanaan kinerja Ditjen Perikanan Budi Daya, Setditjen Perikanan Budi Daya telah melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: (i) Penetapan SS dan IKK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 sebagai upaya untuk memantapkan arah kebijakan pada Setditjen Perikanan Budi Daya selama satu tahun, yang dapat diukur atas tingkat ketercapaian kinerja; (ii) PK Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024; dan (iii) Penyusunan rencana aksi dan evaluasi rencana aksi tahun 2024.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK) Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Perjanjian Kinerja (PK) merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki oleh instansi/satuan kerja. Tujuan perjanjian kinerja adalah untuk: (i) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; (ii) Mendorong komitmen penerima amanah untuk melaksanakan amanah yang diterimanya dan terus meningkatkan kinerjanya; (iii) Alat pengendalian manajemen yang praktis bagi pemberi amanah; (iv) Menilai keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; dan (v) Dasar pemberian penghargaan (*reward*)/sanksi (*punishment*).

Adapun Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3514772
LAMAN www.kkp.go.id SUREL dijenpb@kkp.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Gemi Triastutik**
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya
Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : **Tb. Haeru Rahayu**
Jabatan : Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya
Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal
Perikanan Budi Daya

Gemi Triastutik

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA**

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik di Lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	1. Nilai FM SAKIP Setditjen PB (Persen)	82
	2. Persentase Pelaku Usaha Budi Daya Ikan yang terintegrasi KUSUKA (Persen)	80
	3. Persentase Data Produksi Perikanan Budi Daya yang Tervalidasi (Persen)	80
	4. Persentase Data Realisasi Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan Ikan yang Terintegrasi (Persen)	100
	5. Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budidaya (Indeks)	85
	6. Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya (Nilai)	75
	7. Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB (Level)	3
	8. Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dan Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP (Nilai)	76
	9. Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	100
	10. Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani (Persen)	65
	11. Unit Kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar (Persen)	94

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	12. Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya (Persen)	90
	13. Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya (Persen)	≥86
	14. Batas Tertinggi Presentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dibandingkan Realisasi Anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024 (Persen)	100
	15. Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
	16. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	93,76
	17. Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80
	18. Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya (Nilai)	86
	19. Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
	20. Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80
	21. Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya (Persen)	80

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	22. Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB (Nilai)	3,3
	23. Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri (Persen)	75

DATA ANGGARAN :

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN (Rp.)
1.	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya	111.906.162.000
Total Anggaran Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Tahun 2024		111.906.162.000

Jakarta, 20 Januari 2024

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Gemi Triastutik

Jakarta, 20 Januari 2024

Pihak Kedua
Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya

Pihak Pertama
Sekretaris Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya

Tb. Haeru Rahayu

Gemi Triastutik

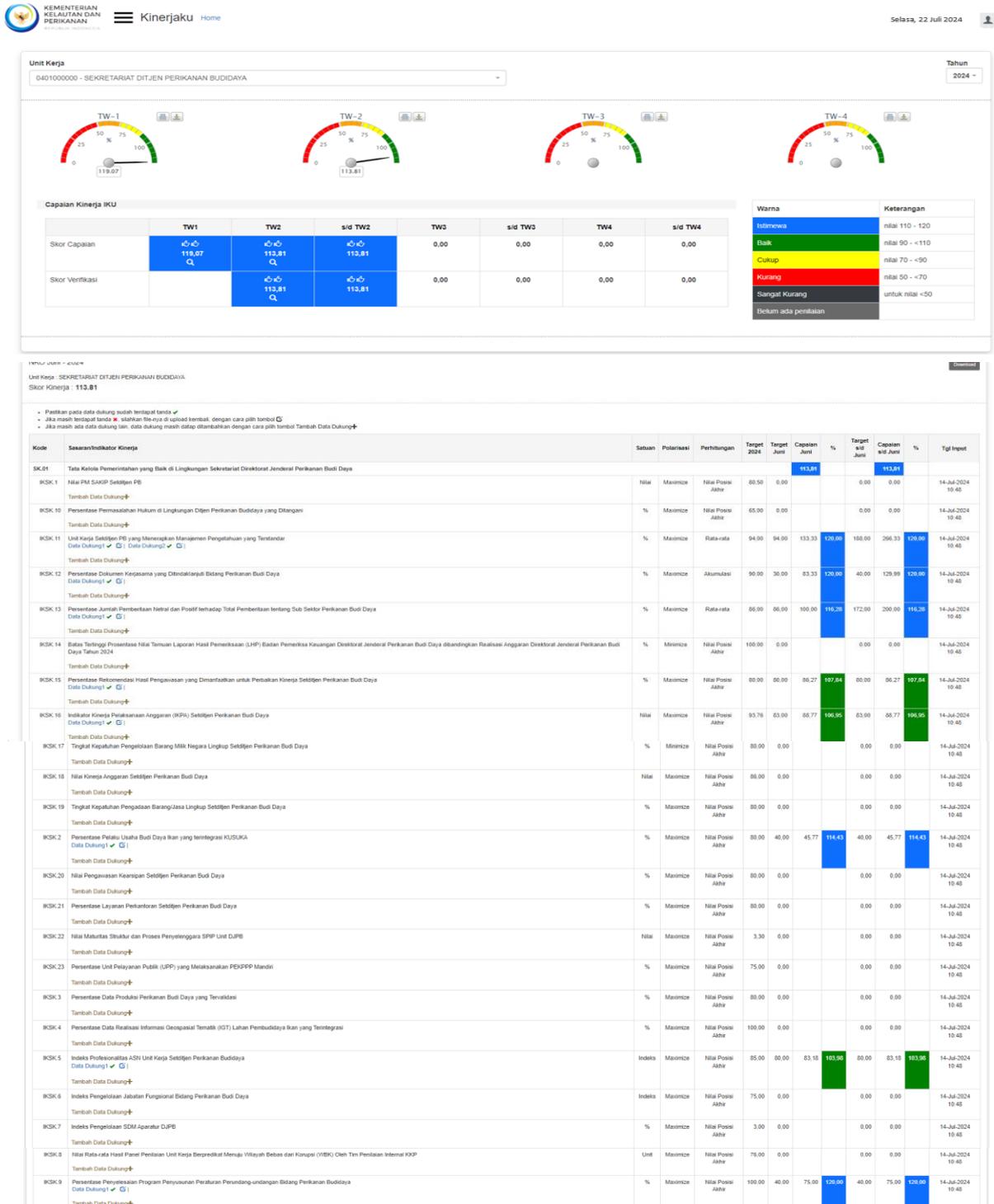
Gambar 8. Perjanjian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

2.4. Pengukuran Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Pengukuran capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan membandingkan antara target yang telah ditetapkan pada PK Setditjen Perikanan Budi Daya dengan data pencapaian kerjanya. Cara pengukuran mengacu pada manual indikator dan pengukuran kinerja dilakukan dari bawah ke atas.

Data yang dimasukkan sebagai pencapaian kinerja harus diverifikasi oleh tim kinerja sebagai data mutakhir yang diambil dari sumber data yang tepat. Pengukuran indikator kinerja yang baik adalah dapat memberikan hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga data yang disajikan harus: (i) Valid, diukur menggunakan alat ukur yang tepat sesuai dengan manual indikator; (ii) *Reliable*, meskipun diukur berulang-ulang hasilnya tetap konsisten; dan (iii) Obyektif, bebas dari intervensi/kepentingan.

Pengukuran capaian kinerja dilakukan secara berkala, didukung oleh implementasi dari aplikasi *Balanced Scorecard (BSC)* yaitu Kinerjaku, yang merupakan sistem aplikasi pengelolaan kinerja berbasis informasi teknologi (dapat diakses melalui www.kinerjaku.kkp.go.id) ditunjukkan dengan warna : (i) merah (untuk indikator yang di bawah batas toleransi); (ii) kuning (untuk indikator dalam batas toleransi); dan (iii) hijau (untuk indikator yang telah/melebihi target).



Gambar 9. Dashboard Capaian Kinerja Setditjen PB

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

Capaian target kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2024 telah menunjukkan hasil yang cukup baik. Keberhasilan capaian dapat terlihat pada nilai capaian IKU dan IK Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dengan nilai NPSS sebesar 113,81% dengan didukung oleh anggaran sebesar Rp.109.685.202.000,- dan telah terealisasi Rp.22.404.140.768,- atau sebesar 20,43% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Terkait hal tersebut, maka segala upaya perbaikan akan terus dilakukan guna meningkatkan kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya dilakukan dengan cara membandingkan target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2024 dengan capaian kinerja yang dihasilkan sampai Tahun 2024.

Berdasarkan sistem pelaporan pada aplikasi Kinerjaku, pengukuran capaian kinerja dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 1. Capaian Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	(%)
1	Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	1	Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	82			
		2	Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA	80	40	45,77	114,43
		3	Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi	80			
		4	Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi	100			

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	(%)
Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	5	Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya	85	80	83,18	103,98
	6	Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya	75			
	7	Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB	3			
	8	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP	76			
	9	Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya	100	40	75	120
	10	Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani	65			
	11	Unit kerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar	94	94	133,33	120
	12	Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya	90	30	83,33	120
	13	Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya	86	86	100	116,28

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	(%)
Tata Kelola Pemerintahan yang baik Lingkup Sekretariat DJPB	14	Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024	100			
	15	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	80	80	86,27	107,84
	16	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya	93,76	83	88,77	106,95
	17	Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80			
	18	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	86			
	19	Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya	80			
	20	Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya	80			
	21	Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya	80			
	22	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggara SPIP Unit DJPB	3,3			
	23	Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP)	75			

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN 2024	TARGET TRIWULAN II	CAPAIAN TRIWULAN II	(%)
	yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri				

3.2. Analisis Capaian Kinerja

Mengukur kinerja tidak hanya dengan melakukan *entry* data capaian, namun juga analisis terhadap pencapaian kinerjanya, karena dengan melakukan analisis kinerja, informasi mengenai kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diketahui dan bermanfaat untuk ketepatan penyusunan strategi peningkatan kinerja pada triwulan berikutnya. Pengukuran capaian kinerja pada masing-masing IK sebagai berikut:

SK.01 Tatakelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan suatu sistem atau cara pengelolaan yang dilakukan oleh pemerintah dalam wujud tanggung jawab yang meliputi wewenang: administrasi, ekonomi hingga politik untuk mengatur segala permasalahan sosial negara. Sejatinya, tata kelola pemerintahan tersebut senantiasa memiliki orientasi terhadap suatu hal yang hendak dituju, yaitu untuk mencapai pemerintahan yang ideal.

IKSK.1 Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

SAKIP merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja (Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang SAKIP).

Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di DJPB. Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 5 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).

Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya berdasarkan hasil penilaian Kemenpan RB atas implementasi SAKIP di DJPB dengan menggunakan instrumen (lembar Kerja Evaluasi) yang sudah dirumuskan oleh KEMENPAN-RB.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 82 (Nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada 2 kegiatan, yaitu Layanan

Perencanaan dan Penganggaran dan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 34,37% dari anggaran sebesar Rp. 5.372.851.000,-.

Tabel 2. Capaian Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		82					-	82	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai PM SAKIP Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	59,05	82			82	

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melakukan penyusunan dokumen pendukung mengacu pada dokumen SAKIP (evaluasi rencana aksi, aplikasi Kinerjaku, dan LKj) dan melakukan verifikasi capaian kinerja pada aplikasi kinerja Kinerjaku KKP.

Kendala yang dihadapi yaitu dokumen SAKIP yang disajikan masih belum lengkap dan koordinasi antar SDM yang kurang dalam melakukan verifikasi capaian kinerja pada aplikasi Kinerjaku KKP secara online.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu memperbaiki:

1. Penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART;
2. Pengukuran kinerja yang efektif dan efisien dengan pemberian *reward and punishment* dengan mengacu pada peraturan per-UU yang berlaku;
3. Memperbaiki peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dengan mengadakan bimbingan teknis atau sosialisasi tata cara pengisian PM SAKIP pada aplikasi Kinerjaku KKP.

IKSK.2 Persentase Pelaku Usaha Budidaya Ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan pelaku usaha, percepatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan serta menciptakan efektivitas dan efisiensi program Pemerintah dan pendataan kepada pelaku usaha agar tepat sasaran, maka KKP melakukan identifikasi terhadap para pelaku usaha bidang kelautan dan perikanan dengan diterbitkannya Kartu KUSUKA (Kartu Pelaku Usaha Kelautan dan Perikanan).

Kartu KUSUKA berfungsi sebagai Identitas profesi Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; basis data untuk memudahkan perlindungan dan pemberdayaan, pelayanan,

dan pembinaan kepada Pelaku Usaha di bidang Kelautan dan Perikanan; dan sarana untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program Kementerian.

Persentase pelaku usaha budidaya ikan yang terintegrasi KUSUKA, merupakan penilaian atas capaian pendataan pelaku usaha yang telah terdaftar di database KUSUKA dengan status submit valid dan revisi. Pendataan pelaku usaha bertujuan untuk mengumpulkan/*updating* data pelaku usaha budidaya ikan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen) dengan capaian pada triwulan II sebesar 45,77% dari target yang ditetapkan pada triwulan II sebesar 40%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi, Supervisi Data Perikanan Budidaya dan Data KUSUKA dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 38,46% dari anggaran sebesar Rp.640.000.000,-.

Tabel 3. Capaian Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80	40	45,77	114,43	114,43	-	80	114,43

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Persentase Pelaku Usaha Budidaya ikan yang Terintegrasi KUSUKA										
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	80	80	40	45,77	114,43	80	114,43

Untuk mendukung capaian pada indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 yaitu:

1. Kegiatan sosialisasi dan pengumpulan data kusuka belum terlaksana pada triwulan II,
2. Pembayaran honor enumerator triwulan dalam tahap perhitungan berdasarkan pada data hasil *entry* data enumerator yang terkompilasi pada aplikasi satudata, dan
3. Validasi data KUSUKA telah dilakukan oleh validator kabupaten kota dan validator pusat, semua hasil validasi data kusuka akan terkompilasi pada aplikasi satudata.

Kendala yang dihadapi pada triwulan II tahun 2024 yaitu :

1. Sosialisasi pengumpulan data belum terlaksana karena terkendala dengan revisi anggaran dan anggaran untuk sosialisasi dan pengumpulan data KUSUKA untuk sementara di revisi dan digunakan untuk mendukung kegiatan prioritas yang lain, dan
2. Pembayaran honor enumerator masih terkendala dengan nama enumerator yang belum sama persisi antara nama enumerator di SK dan nama enumerator di database satu data sehingga perhitungan honoronya menjadi lebih lama

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Mempercepat proses pengumpulan data kusuka,
2. Diharapkan adanya aplikasi yang dapat menghitung honor enumerator secara otomatis by sistem untuk mempercepat proses pembayaran, dan
3. Validator kabupaten/kota agar dapat lebih aktif dalam memvalidasi data baik produksi maupun kusuka.

IKSK.3 Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Data produksi adalah catatan atas kumpulan fakta mengenai suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda. Produksi ikan adalah semua hasil penangkapan/budidaya ikan/binatang air lainnya/tanaman yang ditangkap/dipanen dari sumber perikanan alami atau dari tempat pemeliharaan, baik yang diusahakan oleh perusahaan perikanan maupun rumah tangga perikanan. Volume produksi dihitung dalam bentuk berat basah ikan hasil tangkapan/Budidaya.

Budidaya perikanan didefinisikan sebagai suatu kegiatan untuk memproduksi biota (organisme) akuatik secara terkontrol dalam rangka mendapatkan keuntungan (profit). Definisi Budidaya perikanan lainnya adalah campur tangan (upaya-upaya) manusia untuk meningkatkan produktivitas perairan. Validasi adalah pengesahan atau pengujian kebenaran atas sesuatu.

Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang tervalidasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pendataan produksi sampling tervalidasi yang telah ditetapkan dibandingkan dengan target sampling serta capaian atas validasi nasional pada aplikasi dalam ruang lingkup pendataan produksi kelautan dan perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi, Validasi dan Supervisi Data Perikanan Budidaya pada triwulan II sebesar 46,88% dengan anggaran sebesar Rp.1.296.691.000.

Tabel 4. Capaian Persentase Data Produksi Perikanan Budidaya yang Tervalidasi

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Persentase Data Produksi Perikanan Budiaya yang Tervalidasi								
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra	
-		80					-	80		

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Data Produksi Perikanan Budiaya yang Tervalidasi									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	98,74	80			80	

Pada triwulan II tahun 2024, kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Validasi data KUSUKA telah dilakukan oleh validator kabupaten kota dan validator pusat, semua hasil validasi data kusuka akan terkompilasi pada aplikasi satudata,
2. Perjalanan dalam rangka pemantauan kinerja enumerator dan kepatuhan data sudah dilaksanakan ke beberapa kabupaten seperti Kab. Purwakarta, Kab. Tasikmalaya, Kab Sidoarjo, Kab. Maros, dimana dari semua kabupaten atau kota yang dikunjungi sudah dilaporkan dan secara umum kinerja enumerator masih sesuai dengan harapan tapi cenderung masih dibawah target pengisian kuesioner terutama untuk sampling data produksi,
3. Analisis data produksi sudah diselesaikan dan sudah digunakan untuk menyusun LKj triwulan II, adapun hasil analisis yang dihasilkan adalah analisis produksi triwulan II, analisis pendapatan pembudidaya ikan, analisis data NTPi dan analisis data produksi ikan hias.

Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu :

1. Kurangnya kesadaran validator kabupaten/kota untuk melakukan validasi data kusuka sehingga masih ada data kusuka dari triwulan II yang belum tervalidasi, dan
2. Untuk mensupervisi daerah-daerah remote yang tidak terjangkau moda transportasi umum diperlukan biaya lebih untuk mencapainya sementara biaya untuk supervisi dibatasi oleh berbagai aturan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya :

1. Koordinasi dengan validator dan enumerator untuk mempercepat proses validasi data,
2. Melakukan pemetaan wilayah - wilayah yang akan disupervisi kinerja enummeratornya, terutama wilayah yang enumeratornya kurang aktif, dan
3. Melakukan pengumpulan bahan untuk analisis data di triwulan III.

IKSK.4 Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Termatik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Geospasial dan Informasinya diatur dengan UU 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial. Informasi Geospasial (IG) adalah Data Geospasial (DG) yang sudah diolah

sehingga dapat digunakan sebagai alat bantu dalam perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, dan/atau pelaksanaan kegiatan yang berhubungan dengan ruang kebumian.

Informasi Geospasial Tematik yang selanjutnya disingkat IGT adalah IG yang menggambarkan satu atau lebih tema tertentu yang dibuat mengacu pada Informasi Geospasial Dasar (IGD).

Persentase Realisasi Data IGT lahan pembudidayaan ikan yang Terintegrasi, merupakan penilaian atas capaian realisasi pengintegrasian data IGT lahan pembudidayaan ikan yang telah dilakukan oleh unit data eselon 1 sesuai matriks rencana aksi yang telah ditetapkan oleh masing-masing unit kerja.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Data dan Informasi dan Validasi Peta Lahan Pembudidayaan pada triwulan II sebesar 44,84% dengan anggaran sebesar Rp.470.809.000,-.

Tabel 5. Capaian Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		100					-	100	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Realisasi Data Informasi Geospasial Tematik (IGT) Lahan Pembudidayaan ikan yang Terintegrasi									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	100	100			100	

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini yaitu telah dilaksanakan penunjukan langsung untuk kegiatan jasa konsultasi dibawah 100 juta dengan pertimbangan efisiensi waktu dan pengalaman kerja konsultan yang sudah berpengalaman dalam mendelineasi peta lahan pembudidayaan ikan dan sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 telah di delineasi 4 provinsi dan telah dilakukan kontrol kualitas sesuai dengan format BIG.

Sampai dengan triwulan II tahun 2024 belum ditemukan kendala dalam upaya pencapaian IKU ini.

Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah menyelesaikan pekerjaan delineasi dan melakukan kontrol kualitas terhadap data hasil delineasi dan mengintegrasikan hasil delineasi ke dalam satu peta PUSDATIN.

IKSK.5 Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Profesionalitas adalah kualitas para anggota profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk melakukan tugas-tugasnya. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan (Permen PAN dan RB No. 38 Tahun 2018).

Nilai Indeks Profesionalitas ASN merupakan gambaran kualitas profesionalitas ASN KKP yang diukur setiap tahun oleh Biro SDMA, Sekretariat Jenderal dengan mengacu pada Peraturan Menteri PAN dan RB No. 38 Tahun 2018 tentang Peraturan Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara.

Nilai diukur setiap tahun dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, meliputi:

- 1) Kualifikasi, diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai, meliputi:
 - a. Pendidikan S-3 (Strata-Tiga);
 - b. Pendidikan S-2 (Strata-Dua);
 - c. Pendidikan S-1 (Strata-Satu) /D-4 (Diploma-Empat);
 - d. Pendidikan D-3 (Diploma-Tiga) / SM (Sarjana Muda);
 - e. Pendidikan D-1 (Diploma-Satu) /D-2 (Diploma-Dua)/ SLTA Sederajat; dan
 - f. Pendidikan di bawah SLTA.
- 2) Kompetensi, diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan yang meliputi: Diklat Kepemimpinan, Diklat Fungsional/Diklat Teknis, Diklat 20 Jam Pelajaran (JP) satu tahun terakhir dan Seminar/Workshop/Konferensi/Setara sejak 2 (dua) tahun terakhir.
- 3) Kinerja, diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS, yang meliputi :
 - a. Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
 - b. Perilaku kerja.
- 4) Disiplin, diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami selama 5 tahun terakhir, yang meliputi :
 - a. Tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin; dan
 - b. Pernah dijatuhi hukuman disiplin (ringan, sedang, berat).

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 85 (indeks). Pada periode triwulan II sebesar 83,18% dari target yang ditetapkan dari target triwulan II sebesar 80%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kinerja kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Pengembangan dan Pembinaan Disiplin ASN dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 59,55% dari anggaran sebesar Rp.1.404.445.000.

Tabel 6. Capaian Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		85	80	83,18	103,98	103,98	-	85	103,98

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Indeks Profesionalitas ASN Unit Kerja Setditjen PB										
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	74,7	85,8	84,41	81	85	80	83,18	103,98	85	103,98

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu:

1. Mengikuti kegiatan pelatihan secara *e-learning* di e-melia sejumlah 2 orang,
2. Telah dilaksanakan pembinaan kode etik dan disiplin ASN lingkup Sekretariat DJPB pada Juni 2024 (pelanggaran terhadap ketentuan hari dan jam kerja serta pengisian SKP), dan
3. Telah dilaksanakan evaluasi kinerja ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk Periode I Tahun 2024, pada Bulan April 2024.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah masih terdapat ASN yang kurang teliti dalam mengisi hasil kerja pada aplikasi ekinerja BKN, sehingga yang bersangkutan tidak dapat dinilai tepat waktu oleh pimpinan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah akan dilakukan monitoring secara berkala dengan harapan seluruh ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat dinilai hasil kerja oleh pimpinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.

IKSK.6 Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya

Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah upaya untuk mengelola, meningkatkan dan mengendalikan standar profesi Jabatan Fungsional di bidang Perikanan Budi Daya, yang terdiri atas 4 (empat) jabatan fungsional, yaitu (1) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keahlian /Analis Akuakultur, (2) Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keahlian/ Pengelola Kesehatan Ikan, (3) Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Akuakultur, dan (4)

Pengendali Hama dan Penyakit Ikan Kategori Keterampilan/Teknisi Kesehatan Ikan, dengan lingkup pengelolaan yang meliputi pembinaan, pemberian rekomendasi kebutuhan jabatan fungsional, penilaian kinerja, penyusunan pedoman, penata laksanaan administrasi jabatan fungsional, dan fasilitatif pengembangan karir jabatan fungsional bidang perikanan budi daya.

Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya dalam upaya peningkatan dan pengendalian standar profesi Jabatan Fungsional berdasarkan Permen PAN RB Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional PNS, Permen PAN RB Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pembinaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Yang Menduduki Jabatan Fungsional, Per BKN Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembinaan Kepegawaian Jabatan Fungsional, dan Keputusan Menteri KP Nomor 69 Tahun 2021 tentang Unit Kerja Pembina Jabatan Fungsional di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (indeks). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pengembangan, Pengelolaan dan Pembinaan Jabatan Fungsional dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 21,43% dari anggaran sebesar Rp.1.529.300.000,-.

Tabel 7. Capaian Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya								
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra	
-		75					-	75		

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	85,80	75			75	

Beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2024 dalam mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Melakukan sosialisasi/informasi terkait jabatan fungsional bidang perikanan budi daya pada instansi daerah,

2. Telah diusulkan perubahan nomenklatur jabatan fungsional Pengawas Perikanan bidang Pembudidayaan Ikan Ahli Utama dalam JF Analis Akuakultur Ahli Utama,
3. Telah dilaksanakan proses sosialisasi dan penilaian kompetensi periode II Tahun 2024 (Bulan Mei) yang diselenggarakan dalam bentuk bimtek, uji kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dalam rangka kenaikan jenjang jabatan dan perpindahan ke dalam jabatan fungsional bidang perikanan budi daya,
4. Telah dilaksanakan Penyusunan Draft Pedoman Jabatan Fungsional bidang Perikanan Budi Daya, dalam bentuk Rancangan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan,
5. Telah dilaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya untuk instansi daerah, dan
6. Telah diterbitkan surat terkait perubahan nomenklatur jabatan fungsional bidang perikanan budidaya untuk Instansi Daerah.

Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan ini antara lain :

1. Perlu disampaikan informasi terkait potensi penurunan tunjangan setelah penyesuaian nomenklatur dalam JF Analis AKuakultur dan Teknisi Akuakultur,
2. Perlu mencari rujukan sebagai dasar penetapan nilai Angka Kredit bagi pegawai yang lulus uji kompetensi perpindahan JF,
3. Perlu berkoordinasi dengan pemangku jabatan terkait dengan sebaran dan lingkup kegiatan JF Pengelola Kesehatan Ikan, dan
4. Berkoordinasi dengan Instansi Daerah terkait progress perubahan nomenklatur jabatan fungsional bidang perikanan budidaya lingkup Instansi Daerah.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Melaksanakan FGD terkait pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya, khususnya terkait proses penyesuaian nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya),
2. Menyiapkan proses penyesuaian nomenklatur JF Pengawas Perikanan jenjang keterampilan dan keahlian lainnya (pertama, muda, dan madya),
3. Menyiapkan Penetapan Angka Kredit bagi pegawai yang lulus uji kompetensi perpindahan JF,
4. Berkoordinasi dengan Tim Penyusun untuk pemantapan draft Rancangan Pedoman Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan,
5. Melaksanakan verifikasi dan validasi terhadap usulan kebutuhan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya untuk instansi daerah berdasarkan rekomendasi/ penetapan prioritas Biro SDM Aparatur dan Organisasi, dan
6. Melaksanakan Monitoring dan evaluasi terkait pengelolaan jabatan fungsional bidang perikanan budi daya dan perubahan nomenklatur jabatan fungsional bidang perikanan budidaya, lingkup Instansi Daerah

IKSK.7 Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Pengelolaan SDM Aparatur adalah proses pengelolaan SDM Aparatur mulai dari pengangkatan hingga pemberhentian bagi SDM Aparatur lingkup Ditjen Perikanan Budi Daya. Proses tersebut dibagi dalam 3 (tiga) rumpun, yaitu : (1) proses Mutasi, yang terdiri dari proses pengangkatan CANS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, kenaikan pangkat, kenaikan jabatan, pengangkatan pertama dalam jabatan, perpindahan jabatan, pencantuman gelar pendidikan, proses peninjauan masa kerja, kenaikan gaji berkala, perpindahan SDM Aparatur dan pemberhentian; (2) proses ketatausahaan, yang terdiri dari proses pembuatan kartu pegawai/istri/suami, proses izin cuti, dan pemberian penghargaan atau sanksi, dan (3) informasi ASN, yang terdiri dari : rekapitulasi kehadiran, perhitungan tunjangan kinerja, pelaksanaan pengambilan sumpah PNS, dan peremajaan data ASN.

Indeks pengelolaan SDM Aparatur merupakan pengukuran kualitas proses pengelolaan SDM Aparatur, yang menyatakan tingkat penyimpangan proses dalam stantar mutu yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 3 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen SDM dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 43,79% dari anggaran sebesar Rp.866.255.000,-.

Tabel 8. Capaian Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya								
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB								
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra	
-		3					-	3		

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Indeks Pengelolaan SDM Aparatur DJPB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	6	3			3	

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2024 adalah :

1. Kegiatan yang mendukung komponen usul kebutuhan ASN :
 - a. Telah dilaksanakan verifikasi hasil input kebutuhan ASN Tahun 2024 pada aplikasi SIASN di Kota Bogor pada tanggal 3 s.d. 5 April 2024, dan

- b. Telah dilaksanakan evaluasi rincian kebutuhan jabatan ASN Tahun 2024 di Kota Sukabumi pada tanggal 20 s.d. 23 Mei 2024.
2. Kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi, yaitu telah dilaksanakan uji kompetensi terhadap PNS yang akan melaksanakan tugas belajar atau izin belajar di Ballroom GMN III pada tanggal 13 s.d. 14 Juni 2024 dan pada tanggal 24 Juni 2024,
3. Kegiatan yang mendukung komponen proses mutasi :
 - a. Kenaikan Pangkat, yaitu : 1). Telah diproses usul kenaikan pangkat Periode 1 Juni 2024 sejumlah 8 orang (batas akhir pengusulan pada 30 April 2024) 2). Telah diproses usul kenaikan pangkat Periode 1 Agustus 2024 sejumlah 11 orang (batas akhir pengusulan pada 30 Juni 2024),
 - b. Pengelolaan Jabatan Fungsional Bidang Non Perikanan Budidaya dengan mengajukan permohonan penerbitan PAK Integrasi Jabatan Pranata Hubungan Masyarakat.
4. Kegiatan yang mendukung komponen ketatausahaan, yaitu telah dilaksanakan uji lapang bagi calon penerima penghargaan Satyalancana Wira Karya pada Bulan Mei s.d. Juni 2024.

Kendala yang dihadapi adalah proses kenaikan pangkat terdapat kendala dikarenakan proses perubahan nomenklatur jabatan untuk jabatan fungsional pengawas perikanan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Kegiatan yang mendukung pengembangan kompetensi akan dilakukan verifikasi kelengkapan berkas usul rekomendasi tugas belajar dan izin belajar Tahun 2024,
2. Kegiatan yang mendukung komponen proses mutasi, akan dilakukan dengan membuat rencana kenaikan pangkat Periode 1 Oktober 2024 dan Periode 1 Desember 2024, dan
3. Kegiatan yang mendukung komponen ketatausahaan, akan dilakukan dengan penyampaian Piagam Penghargaan Satyalancana Karya Satya dan Satyalancana Wira Karya.

IKSK.8 Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) adalah kegiatan yang dilakukan oleh instansi pemerintah dengan menunjuk satu atau beberapa unit kerja yang diusulkan sebagai unit kerja berstatus WBK/WBBM, dengan persyaratan antara lain dianggap sebagai unit penting/strategis dalam melaksanakan pelayanan publik, mengelola sumber daya yang cukup besar, dan memiliki tingkat keberhasilan reformasi birokrasi yang cukup baik.

Pembangunan ZI menuju WBK-WBBM merupakan miniatur penerapan reformasi birokrasi di beberapa unit kerja yang bertujuan membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

Proses penetapan predikat WBK/WBBM dilakukan berdasarkan penilaian berjenjang dimulai dari penilaian mandiri oleh Tim Penilai Internal (TPI) KKP, kemudian Tim Penilai Nasional (TPN) yaitu Kementerian PAN-RB dengan mengacu pada kriteria penilaian yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Instansi Pemerintah.

Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) merupakan suatu predikat yang diperoleh unit kerja yang memenuhi standar penilaian sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi, yaitu:

1. Memiliki nilai total (pengungkit dan hasil) minimal 75 dengan minimal nilai pengungkit adalah 40;
2. Bobot nilai per area pengungkit minimal 60% untuk semua area pengungkit;
3. Memiliki nilai komponen hasil “Terwujudnya Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN” minimal 18,25, dengan nilai sub komponen “Survei Persepsi Anti Korupsi” minimal 15,75 (survei 3,60) Nilai Sub Komponen “kinerja lebih baik” minimal 2,50;
4. Memiliki nilai komponen hasil “Pelayanan Publik yang Prima” minimal 14,00 (survei 3,20).

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 76 (unit). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal serta Pembangunan Zona Integritas WBK/ WBBM dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 50,97% dari anggaran sebesar Rp.252.000.000.

Tabel 9. Capaian Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		76					-	76	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (WBK) Oleh Tim Penilai Internal KKP									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	5	-	8	11	79,93	76			76	

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, ada beberapa kegiatan yang dilakukan pada triwulan 2 tahun 2024 yaitu telah dilaksanakan Asistensi (Pendampingan) Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM) ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam rangka pemenuhan dokumen bukti dukung sebagai berikut:

- a. Pendampingan di BPBAT Mandiangin pada tanggal 30 April – 3 Mei 2024, dan
- b. Pendampingan di BPBAT Tatelu pada tanggal 29 April – 5 Mei 2024

Kendala yang dihadapi yaitu unit kerja belum disiplin dalam melakukan *update* dokumen data dukung penilaian sehingga simulasi nilai yang diperoleh pada saat asistensi (pendampingan) kadang belum optimal.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu koordinasi dengan UPT agar dapat mengirimkan data dukung tepat waktu.

IKSK.9 Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan.

Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Bidang Perikanan Budidaya adalah sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 204 Tahun 2023 tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri dan Keputusan Menteri di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2024.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan II sebesar 75% dari target yang ditetapkan pada triwulan II sebesar 40%, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada setiap semester tahun berjalan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hukum dan Layanan Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 29,15% dari anggaran sebesar Rp.991.520.000,-.

Tabel 10. Capaian Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		100	40	75	120	120	-	100	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Persentase Penyelesaian Program Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Bidang Perikanan Budidaya										
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
87,50	87,50	108,33	70,00	100	100	100	100	40	75	120	100	120

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini yaitu :

1. Terlaksananya penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dibidang perikanan budidaya khususnya terkait rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengenalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi, dan
2. Telah dilakukan konsultasi publik rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengenalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi di Surabaya, pada tanggal 25 Juni 2024.

Terdapat kendala dalam penyelesaian program penyusunan peraturan perundang-undangan bidang perikanan budidaya yaitu :

1. Pelaksanaan pembahasan kurang intensif (tidak dihadiri oleh pejabat yang kompeten dan berwenang memutuskan), dan
2. Belum maksimalnya partisipasi aktif oleh peserta konsultasi publik

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu Finalisasi rancangan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan Nomor 37/PERMEN-KP/2019 tentang Pengenalian Residu Pada Kegiatan Pembudidayaan Ikan Konsumsi.

IKSK.10 Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Advokasi hukum adalah pemberian layanan hukum kepada penerima advokasi yang menghadapi masalah hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perikanan budidaya.

Advokasi terdiri dari (1) konsultasi hukum, (2) pendapat hukum, (3) pendampingan hukum, dan (4) penyelesaian permasalahan hukum.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 65 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode

kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hukum dan Analis dan Evaluasi Produk Hukum dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 21% dari anggaran sebesar Rp.258.480.000,-.

Tabel 11. Capaian Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani							
2023		2024				% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024
Realisasi		Target		Realisasi		Capaian			
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		65					-	65	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Permasalahan Hukum di Lingkungan Ditjen Perikanan Budi Daya yang Ditangani									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	65	65			65	

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada triwulan 2 tahun 2024 yaitu terlaksananya koordinasi dengan unit kerja terkait konsultasi hukum pengadaan barang dan jasa dibidang perikanan budidaya.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah unit kerja belum disiplin dalam penyusunan dokumen pengadaan barang dan jasa.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan koordinasi dengan unit kerja terkait pendampingan dan konsultasi hukum mengenai pengadaan barang dan jasa di bidang perikanan budidaya.

IKSK.11 Unit Kerja Setditjen Perikanan Budi Daya yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar *Collaboration Office* adalah suatu rangkaian memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan dan mendistribusikan pengetahuan dalam rangka meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sasaran Strategis dari Sistem Manajemen Pengetahuan Terstandar *Collaboration Office* ini adalah Tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah di akses, agar dapat mencapai nilai sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Indikator Kinerja

Utama (IKU), yaitu persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

Pengukuran IKU Manajemen Pengetahuan Terstandar KKP menggunakan platform Portal *Collaboration Office* <https://portal.kkp.go.id>. Terdapat menu Linimasa yaitu merupakan salah satu halaman pada menu Pengetahuan yang menampilkan postingan atau unggahan dari pimpinan atau pegawai yang memiliki hak akses untuk membuat postingan.

Komponen penilaian pada sistem manajemen pengetahuan terstandar *Collaboration Office* yaitu keaktifan (100%) maksimal nilai yang dapat diterima pegawai yang wajib dinilai, yaitu pejabat Eselon II.

Penghitungan indikator manajemen pengetahuan berasal dari penilaian komponen keaktifan yang dilakukan setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah ditentukan.

Adapun formula untuk penghitungan capaian indikator tersebut, terdiri dari :

1. Kegiatan dengan memenuhi unsur 5W1H (*What, When, Where, Who, Why dan How*) dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 0,5.
2. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk infografis dengan sumber pengetahuan yang jelas akan mendapatkan poin 1.
3. Berbagi pengetahuan yang dituangkan dalam bentuk konten video/jurnal akan mendapatkan poin 3.

Selain itu, juga terdapat cara mengukur capaian yaitu dengan menghitung keaktifan pada setiap triwulan dengan komposisi minimal mendapatkan 3 poin upload keaktifan dan maksimal 4 poin upload keaktifan sesuai dengan bobot poin yang telah di tentukan. Pengukuran level 1 dihitung dengan keaktifan pejabat Eselon II yang memenuhi unsur pengetahuan sesuai kriteria.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 94 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 133,33% dari target yang ditetapkan pada triwulan II sebesar 94%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dengan capaian pada triwulan II sebesar 8,12% dari anggaran sebesar Rp.685.236.000,-.

Tabel 12. Capaian Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian			Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		
-		94	94	133,33	120	120	-	94	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Unit kerja Setditjen PB yang Menerapkan Manajemen Pengetahuan yang Terstandar										
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
51,8	72,33	92,47	100	100	100	130	94	94	133,33	120	94	120

Dalam mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, ada beberapa kegiatan yang telah dilakukan pada triwulan II tahun 2024 yaitu :

1. Terlaksananya sosialisasi dan koordinasi dengan setiap unit kerja eselon 2 DJPB baik melalui Tim Kerja Dukungan Manajerial ataupun sekretaris terkait tata cara penggunaan aplikasi platform portal collaboration office serta nilai yang harus dicapai,
2. Terpenuhinya unsur 5W1H (What, When, Where, Who, Why, dan How) para peserta dalam melakukan postingan, dan
3. Terlaksananya koordinasi dengan pusdatin untuk informasi peserta yang belum aktif, serta kendala-kendala yang dihadapi oleh peserta sehingga dapat diatasi.

Terdapat kendala dalam pencapaian indikator ini yaitu perlu mengingatkan para peserta baik secara formal maupun informal terkait pemenuhan unsur 5W1H serta dalam melakukan jumlah postingan harus mencapai nilai 4 poin.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Menekankan untuk mematuhi standar 5W1H pada saat melakukan postingan, dan
2. Menekankan peserta dalam melakukan postingan diharapkan selalu memenuhi unsur 5W1H serta mencapai jumlah maksimal yang dapat dinilai oleh PUSDATIN yaitu 4 Poin sebelum batas waktu yang di tentukan dalam setiap periode.

IKSK.12 Persentasi Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya

Perjanjian adalah kesepakatan antara Ditjen Perikanan Budi Daya dengan pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu kegiatan tertentu di bidang perikanan budidaya yang dituangkan secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban serta mengikat para pihak, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN/2022 tentang Pedoman Kerja Sama dan Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kelautan dan Perikanan.

Prakarsa kerja sama dapat berasal dari internal Ditjen Perikanan Budi Daya maupun dari calon mitra Kerja Sama. Dokumen kerja sama bidang perikanan budi daya merupakan bentuk nota kesepakatan atau perjanjian kerja sama yang sudah ditandatangani antara 2 (dua) pihak atau lebih.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 90 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 83,33% dari target yang

ditetapkan pada triwulan II sebesar 30%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dan Kerjasama dengan capaian pada triwulan II sebesar 35,31% dari anggaran sebesar Rp.1.612.000.000,-.

Tabel 13. Capaian Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		90	30	83,33	120	120	-	90	120

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Persentase Dokumen Kerjasama yang Ditindaklanjuti Bidang Perikanan Budi Daya										
		Realisasi 2017-2023					2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
95	-	89,05	90,26	94,74	100	100	90	30	83,33	120	90	120

Adapun kegiatan yang dilakukan selama triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian indikator ini adalah sebagai berikut:

1. Melakukan *review* perjanjian kerja sama antara Balai Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi tentang Penyelenggaraan Peningkatan Kompetensi Guru Produktif Berstandar Industri,
2. Telah mereview perjanjian kerja sama antara Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Negeri Kudus dengan BBPBAP Jepara tentang Penyelenggaraan Penelitian, Pendidikan, Pelatihan dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Perikanan Budidaya,
3. Melakukan review perjanjian kerja sama antara PT.Nawakara Perkasa Nusantara dengan BBPBAP Jepara tentang Penyediaan Lokasi Diklat Keamanan di Jawa Tengah,
4. Melakukan review perjanjian kerja sama antara Yayasan Konservasi Alam Nusantara dan BBPBAP Jepara tentang Pengembangan Budidaya Udang Windu di Tambak Program *Shrimp Carbon Aquaculture (SECURE)*,
5. Review perjanjian kerja sama antara BPBAT Mandiangin dengan Fakultas Perikanan Univ.Kristen Palangkaraya tentang Dukungan Penyelenggaraan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka,
6. Audiensi kerjasama IFAD,
7. Pembahasan rencana kerjasama *fleming fund fase 2*, dan
8. Membuat draft/konsep perjanjian kerjasama antara DJPB dengan Deputi Bidang Karantina Ikan Badan Karantina Indonesia (BARANTIN) tentang Sinergi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Perikanan Budi Daya dan Karantina.

Sedangkan kendala yang dihadapi untuk pencapaian indikator ini adalah terkait dengan masukan terhadap draft perjanjian kerjasama maupun rencana kerja sama belum ada tanggapan dari pihak mitra sehingga membutuhkan waktu.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya, yaitu melakukan rapat finalisasi pembahasan PKS antara DJPB dengan Pemda Kab.Maluku Tenggara dan Kab.Rote Ndao, pembahasan PKS antara DJPB dengan Barantin, serta melakukan pembahasan terkait kerjasama dengan IFAD, dan rapat pembahasan terhadap tindaklanjut kerjasama *fleming fund fase 2*, melakukan rapat pembahasan review PKS BBPBAP Jepara dengan pihak mitra.

IKSK.13 Presentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budi Daya

Berita positif adalah kalimat berita yang di dalamnya tidak dijumpai ada pengingkaran. Penghitungan Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya.

Dalam rangka menyebarluaskan pencapaian pembangunan Kelautan dan Perikanan berbasis ekonomi biru, pada sub sektor perikanan budi daya yaitu pengembangan perikanan budidaya berkelanjutan di laut, pesisir dan tawar yang berorientasi ekspor dan berbasis kearifan lokal, salah satu langkah yang dilakukan oleh Sub Bagian Humas Ditjen Perikanan Budi Daya adalah pelaksanaan penyebaran informasi dan publikasi terkait kegiatan kunjungan kerja pimpinan, yaitu kegiatan Direktur Jenderal Perikanan Budi Daya bersama Menteri Kelautan dan Perikanan maupun Tim Komisi IV DPR RI serta stakeholder lainnya. Kegiatan ini dilakukan di berbagai lokasi perikanan budidaya maupun Unit Pelaksana Teknis lingkup DJPB.

Peliputan kegiatan yang telah dilaksanakan tersebut disusun ke dalam bentuk press release, selanjutnya bekerjasama dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Kelautan dan Perikanan menyebarluaskan pemberitaan tersebut ke berbagai media, baik cetak maupun online.

Perhitungan Rasio jumlah pemberitaan yang netral dan positif dibanding total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya dihitung dalam kurun periode triwulan. Terdapat komponen dan bobot yang menjadi dasar penilaian dalam menghitung rasio jumlah pemberitaan netral dan positif terhadap total pemberitaan tentang sub sektor perikanan budi daya terdiri dari 2 (dua) tolak ukur, yaitu: (i) pemberitaan netral dan positif; dan (ii) total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya.

Selain itu, juga terdapat komponen pembentuk dan cara mengukur, yaitu :

1. Penilaian dilakukan setiap triwulan
2. Pengukuran dokumen yang terdiri dari jumlah pemberitaan netral dan positif
3. Pengukuran total pemberitaan sub sektor perikanan budi daya

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (persen). Pada periode triwulan II, indikator ini telah tercapai sebesar 100% dari target yang

ditetapkan pada triwulan II sebesar 86%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Hubungan Masyarakat dengan capaian pada triwulan II sebesar 25,76% dari anggaran sebesar Rp.3.713.228.000,-.

Tabel 14. Capaian Persentase Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentasi Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		86	86	100	116,28	116,28	-	86	116,28

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya											
Indikator Kinerja		Persentasi Jumlah Pemberitaan Netral dan Positif terhadap Total Pemberitaan tentang Sub Sektor Perikanan Budidaya											
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024	
-	-	-	-	-	-	100	86	86	100	116,28	86	116,28	

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu:

1. Berkoordinasi dengan Biro Humas dan Kerjasama Luar Negeri terkait dengan pemberitaan netral dan positif di bidang perikanan budi daya, dan
2. Mengumpulkan pemberitaan harian sub sektor perikanan budi daya serta mengantisipasi kemunculan berita negatif dan persentase berita negatif.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu kurangnya proaktif terhadap perkembangan isu-isu seputar sub sektor perikanan budi daya serta dapat produktif dalam menghasilkan press release dan mendistribusikan bahan-bahan publikasi mengenai sub sektor perikanan budi daya.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya adalah melakukan publikasi kegiatan DJPB yang positif dan netral dengan melakukan penyebaran melalui *press release*.

IKSK.14 Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan Realisasi Anggaran Ditjen Perikanan Budi Daya Tahun 2024

Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK DJPB dibandingkan realisasi anggaran TA. 2024 adalah Nilai Temuan atas laporan keuangan yang ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas LK DJPB merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Batas tertinggi jumlah temuan atas Laporan Keuangan TA. 2024 (audit) tidak melebihi 1%.

Temuan audit adalah hasil evaluasi dari bukti audit yang dikumpulkan terhadap kriteria audit. Temuan audit dapat mengindikasikan, baik kesesuaian ataupun ketidaksesuaian dengan kriteria audit atau peluang perbaikan. Pengertian ketidaksesuaian sendiri adalah penyimpangan melalui bukti obyektif atas kriteria audit yang ditetapkan auditor harus menginvestigasi untuk menentukan secara tepat kriteria audit yang dilanggar dan menetapkan rekomendasi tindakan perbaikan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 100 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Keuangan dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 48,47% dari anggaran sebesar Rp.1.718.547.000,-.

Tabel 15. Capaian Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		100					-	100	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Batas Tertinggi Prosentase Nilai Temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ditjen PB dibandingkan dengan realisasi anggaran Ditjen PB Tahun 2024										
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024	
-	-	-	-	-	100	100	100			100		

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu melakukan pendampingan pemeriksaan yang dilaksanakan oleh tim BPK RI terhadap satker lingkup DJPB untuk pemeriksaan Laporan Keuangan tahun anggaran 2023.

Kendala yang dihadapi yaitu satker belum sependapat terhadap draft temuan yang disampaikan oleh BPK RI dan juga masih terdapat pencatatan persediaan hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat pada DJPB tidak sesuai dengan kebijakan akuntansi.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Menyelesaikan hasil pemeriksaan tim BPK RI sesuai dengan rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI sehingga menghasilkan kesepakatan tindak lanjut sesuai dengan rekomendasi dan dinyatakan tuntas, dan
2. Melakukan koreksi terhadap pencatatan persediaan hewan dan tanaman sesuai dengan kebijakan akuntansi

IKSK.15 Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan balik informasi, untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan tersebut, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan telah digunakan seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 86,27% dari target triwulan II sebesar 80%.

Tabel 16. Capaian Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80	80	86,27	107,84	107,84	-	80	107,84

Sasaran Strategis	Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya											
Indikator Kinerja	Persentase Rekomendasi Hasil Pengawasan yang Dimanfaatkan untuk Perbaikan Kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya											
Realisasi 2017-2023							2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	74,32	70,41	67,21	89,86	89,15	80	80	86,27	107,84	80	107,84

Untuk mendukung pencapaian Indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 yaitu telah dilakukan penyelesaian secara bertahap terhadap sisa temuan Itjen sehingga hasil yang didapat sudah melampaui target.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi pada triwulan II tahun 2024 yaitu :

1. Dokumen Tindak lanjut tidak sesuai rekomendasi,
2. Belum dilakukan penyetoran ke Kas Negara,
3. Kepala satker sudah mutase, dan
4. Satker mengalami reorganisasi.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Meningkatkan koordinasi dengan satker terkait dan tim TLHP Itjen untuk penyelesaian tindak lanjut, dan
2. Meningkatkan frekuensi rekonsiliasi internal atas sisa hasil temuan Itjen.

IKSK.16 Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Penilaian IKPA berdasarkan Perdirjen Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2022 tentang petunjuk teknis penilaian indikator kinerja pelaksanaan anggaran, terdapat ketentuan umum bahwa penilaian IKPA terdiri dari 3 parameter yaitu :

1. Kualitas implementasi perencanaan anggaran, dimana terdapat 2 penilaian parameter yaitu revisi DIPA dan Deviasi Halaman III DIPA,
2. Kualitas pelaksanaan anggaran, dimana terdapat 5 penilaian parameter yaitu penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan UP dan TUP, dan dispensasi SPM, dan
3. Kualitas hasil pelaksanaan anggaran terdapat 1 penilaian parameter yaitu Capaian Output.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 93,76 (nilai). Pada periode triwulan II indikator ini telah tercapai sebesar 88,77% dari target triwulan II sebesar 83%, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Manajemen Keuangan, Pengelolaan Keuangan Lingkup DJPB dan Pusat dengan capaian pada pada triwulan II yakni sebesar 99,83% dari anggaran sebesar Rp.642.143.000,-.

Tabel 17. Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		93,76	83	88,77	106,95	106,95	-	93,76	106,95

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Setditjen Perikanan Budi Daya										
		Realisasi 2017-2023					2024				Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target Tahunan	Target TW II	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	95,11	89,07	91,51	86,50	93,76	83	88,77	106,95	93,76	106,95

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu perlu perbaikan pada komposisi penilaian Deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran dan pengelolaan UP/TUP.

Permasalahan yang muncul yaitu kurangnya sdm yang memahami terhadap tata cara revisi halaman III DIPA.

Adapun rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu:

1. Melakukan revisi halaman iii dipa,
2. Meningkatkan penyerapan anggaran sesuai target yang di halaman III DIPA, dan
3. Membuat LPJ Bendahara tepat waktu.

IKSK.17 Tingkat Kepatuhan Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Dalam pasal 1 ayat (10) dan (11) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah.

Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya merupakan suatu ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pengelolaan BMN unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun metode perhitungannya dihitung berdasarkan jumlah nilai dari beberapa unsur berikut:

1. Pemanfaatan BMN;
2. Pengamanan BMN dengan membuat Berita acara Peminjaman/ BA Pemakaian kepada masing-masing pegawai yang menggunakan BMN;

3. Mengusulkan Penghapusan atas BMN yang rusak berat kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penjualan atau pemusnahan;
4. Menyusun Rencana kebutuhan BMN lingkup satker secretariat;
5. Tersedianya usulan penetapan status penggunaan BMN untuk pengadaan belanja modal tahun 2023 baik ke pengguna barang dan pengelola barang;
6. Penggunaan BMN hasil pengadaan belanja modal tahun 2023 di dukung Berita Acara Serah Terima (BAST)/Berita Acara Pemakaian;
7. Penyusunan/penyampaian Laporan BMN (Semesteran dan Tahunan) secara tepat waktu, akuntabel dan efisien;
8. Melakukan Verifikasi atas usulan BAST 526xxx pada satker pusat yang akan ditandatangani oleh KPB satker Pusat;
9. Melakukan monitoring dan pembinaan Laporan BMN di kepada seluruh anak satker Sekretariat DJPB (Dit. KKI, Dit. Produksi dan Usaha, Dit. Pakan dan Obat Ikan, Dit. Perbenihan);
10. Melakukan Stock opname fisik atas persediaan yang berada di Gudang penyimpanan;
11. Melakukan Pencatatan, monitoring dan mendistribusikan persediaan dan hasil Pengadaan alat pengolah data kepada pegawai Satker Sekretariat DJPB; dan
12. Membuat SOP terkait pengelolaan BMN.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan BMN dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 47,12% dari anggaran sebesar Rp.556.000.000,-.

Tabel 18. Capaian Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80					-	80	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Barang Milik Negara (BMN) Lingkup Setditjen PB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	76,06	93	80			80	

Dalam mendukung pencapaian indikator ini, kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 yaitu telah dilaksanakannya Pengelolaan BMN seperti Penghapusan, Hibah, Pemakaian, Inventarisasi, Dokumentasi, PSP, Penyusunan Laporan BMN dan Persediaan, *Stock Opname* persediaan.

Kendala yang muncul pada triwulan II tahun 2024 adalah :

1. Belum optimal dalam melakukan inventarisasi aset BMN ke satker binaan (UPT dan Dekon),
2. Satker belum melakukan penghapusan aset BMN yang rusak berat.

Rencana aksi yang akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya diantaranya yakni:

1. Perlu dilakukan inventarisasi aset BMN ke satker binaan (UPT dan Dekon), dan
2. Satker perlu melakukan penghapusan aset BMN yang rusak berat.

IKSK.18 Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengukuran dan evaluasi kinerja anggaran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Cakupan evaluasi kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek Konteks.

Aspek Implementasi adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kegiatan atau program dan pencapaian keluarannya.

Aspek Manfaat adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi Kinerja mengenai perubahan yang terjadi dalam Pemangku Kepentingan sebagai penerima manfaat atas penggunaan anggaran pada program Kementerian / Lembaga.

Aspek Konteks adalah Evaluasi Kinerja Anggaran yang dilakukan untuk menghasilkan informasi mengenai kualitas informasi yang tertuang dalam dokumen RKA-K/L termasuk relevansinya perkembangan keadaan kebijakan Pemerintah.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 86 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Pemantauan dan Evaluasi dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 23,47% dari anggaran sebesar Rp3.230.319.000,-.

Tabel 19. Capaian Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra

-	86						-	86
---	----	--	--	--	--	--	---	----

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya									
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	98,08	71,49	-	95,23	79,52	86			86	

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini adalah satker telah melakukan input capaian output yang dipantau secara berkala melalui aplikasi smart DJA.

Kendala yang dihadapi yaitu perubahan revisi anggaran dampak dari pagu anggaran yang diblokir dan *automatic adjustment* oleh Kementerian Keuangan.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Input capaian output sesuai dengan batas waktu yang ditentukan oleh kemenkeu pada setiap bulannya,
2. Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu *automatic adjustment*, dan
3. Melakukan pemantauan revisi lembar III DIPA yang disesuaikan dengan perubahan anggaran

IKSK.19 Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Tingkat kepatuhan merupakan pengukuran pelaksanaan suatu kegiatan, yang sesuai dengan langkah-langkah yang sudah ditetapkan. Perhitungan tingkat kepatuhan bisa dikontrol bila suatu pelaksanaan program telah sesuai dengan standart.

Pengadaan barang dan jasa adalah suatu kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang atau jasa.

Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen PB merupakan ukuran yang menggambarkan tingkat kepatuhan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa unit Eselon I terhadap ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 27,94% dari anggaran sebesar Rp.105.000.000,-.

Tabel 20. Capaian Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80					-	80	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Tingkat Kepatuhan Pengadaan Barang/Jasa Lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	73,5	76,91	82,85	80			80	

Adapun kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilakukan kegiatan rekonsiliasi pengisian SIRUP dan didapati masih ada Satker yang pengisian belum 100% dan Satker TP dinas kelautan provinsi sudah dalam proses pemuatan user SIRUP untuk kemudian mengisi RUP.

Sedangkan permasalahan yang dihadapi yaitu:

1. Aplikasi pemantuan dari LKPP sering terjadi kendala dan tidak *up to date*,
2. Teknis pencatatan belum seluruhnya dipahami oleh satker

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu :

1. Satker Eselon 1 melakukan pemantauan secara manual dan sedang dibuat aplikasi pemantauan oleh Biro umum dan PBJ,
2. Melakukan pembinaan ke Satker khususnya satker TP Dinas Provinsi, dan
3. Melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pengawasan terhadap kegiatan pengadaan Barang/Jasa.

IKSK.20 Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Pengawasan Kearsipan adalah proses kegiatan dalam menilai kesesuaian antara prinsip, kaidah, dan standar kearsipan dengan penyelenggaraan kearsipan. Audit Kearsipan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif dan profesional berdasarkan standar kearsipan untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan penyelenggaraan kearsipan.

Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan

teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 41,36% dari anggaran sebesar Rp.758.754.000,-.

Tabel 21. Capaian Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya										
2023		2024					% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024		Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi			Capaian					
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama		Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra		
-		80							-	80		
Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya										
Indikator Kinerja		Nilai Pengawasan Kearsipan Setditjen Perikanan Budi Daya										
Realisasi 2017-2023							2024			Renstra 2020-2024		
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024	
-	-	-	-	84,71	92,37	98,32	80			80		

Untuk mendukung pencapaian Indikator Kinerja ini, kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 yaitu telah dilaksanakan penilaian pengawasan kearsipan internal lingkup KKP dan DJPB mendapat nilai 98,32 dari 100.

Adapun kendala yang dihadapi yaitu perubahan aplikasi yang memerlukan adaptasi dari aplikasi e-layar menjadi aplikasi portal KKP.

Sedangkan rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu melakukan pra penilaian ketaatan Arsip.

IKSK.21 Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Layanan Perkantoran adalah merupakan kegiatan layanan yang lebih bersifat pada pelayanan internal layanan jamuan rapat, layanan daya dan jasa, perawatan kendaraan dan layanan-layanan lainnya.

Selain pelayanan internal dalam kegiatan Layanan Perkantoran tersebut juga menyangkut layanan eksternal seperti jamuan bagi tamu, pemberian layanan bagi mitra kerja Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 80 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Umum dengan capaian pada triwulan II yakni sebesar 46,35% dari anggaran sebesar Rp.62.487.552.000,-.

Tabel 22. Capaian Persentase Layanan Perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		80					-	80	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase layanan perkantoran Setditjen Perikanan Budi Daya									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	100	100	80			80	

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu telah dilaksanakan kegiatan layanan perkantoran, layanan konsumsi rapat, layanan pimpinan serta layanan operasional Kendaraan Operasional dan Kendaraan Fungsional.

Kendala yang dihadapi yaitu proses penyusunan timeline dan rencana kegiatan rapat serta penggunaan kendaraan yang sering berubah.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu meningkatkan koordinasi dengan Sekretaris pimpinan serta pemanfaatan layanan konsumsi rapat serta penanggungjawab kendaraan.

IKSK.22 Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB

Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya.

Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus terus ditingkatkan kematangannya (maturitasnya) secara menyeluruh dan terintegrasi untuk mencapai tujuan, yaitu memberikan keyakinan atas tercapainya tujuan organisasi yang efektif dan efisien. Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP adalah tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern di lingkungan unit kerja, Penilaian tingkat maturitas SPIP ini mengacu pada Peraturan Kepala BPKP Nomor 4/2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturitas SPIP.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 3,3 (nilai). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan.

Tabel 23. Capaian Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW II 2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		3,3					-	3,3	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	3,3			3,3	

Adapun kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini yaitu sedang dilakukan penilaian yang dilakukan oleh BPKP dan saat ini sedang dalam proses penilaian mandiri yang selanjutnya akan dilakukan penjaminan kualitas oleh inspektorat mitra.

Sedangkan kendala yang dihadapi adalah terputusnya website penilaian yang dimiliki oleh BPKP.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya yaitu berkoordinasi dengan Inspektorat Jenderal selaku penjamin kualitas SPIP lingkup KKP dalam penilaian mandiri.

IKSK.23 Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat PEKPPP adalah upaya pengukuran sistematis pada suatu unit kerja dalam jangka waktu tertentu guna memperoleh nilai indeks pelayanan publik.

Pelaksanaan PEKPPP Mandiri mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik dan Pedoman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Mekanisme dan Instrumen Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

PEKPPP Mandiri Instansional dilakukan terhadap seluruh ruang lingkup pelayanan publik, yaitu pelayanan barang, jasa dan/atau administratif yang ada di masing-masing Unit Organisasi Eselon I dan dilakukan terhadap seluruh Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP) di lingkungan KKP.

PEKPPP Mandiri sangat penting dilakukan untuk mendukung capaian target kegiatan utama RB General KKP tahun 2024 yaitu pada sasaran “Terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional” melalui kegiatan pelaksanaan pelayanan publik prima. Perubahan sasaran dan kegiatan reformasi birokrasi KKP tahun 2024 tersebut telah ditetapkan dengan Kepmen KP Nomor 166 Tahun 2023 Tentang Perubahan atas Kepmen KP Nomor 32 Tahun 2021 *road map* reformasi birokrasi Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020-2024.

Tahun 2023 Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya melakukan PEKPPP Mandiri pada 18 (delapan belas) Unit Pelayanan Publik dengan hasil nilai sebesar 4,60 (Pelayanan Prima). Hasil tersebut disampaikan oleh Kepala Pusdatin (Pusat Data, Statistik, dan Informasi) melalui Surat Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi KKP Nomor B.521/SJ.7/TU.140/II/2024 tanggal 1 Februari 2024 tentang Penyampaian Hasil PEKPPP Mandiri Instansional KKP Tahun 2023.

Target yang ditetapkan tahun 2024 untuk indikator kegiatan ini adalah 75 (persen). Pada periode triwulan II ini belum dapat dilakukan pengukuran, dikarenakan pengukuran untuk indikator kinerja kegiatan ini pengukurannya dilaksanakan pada akhir periode kegiatan, sedangkan dukungan pelaksanaan kegiatan mendukung indikator kegiatan ini sebagaimana tergambar pada kertas kerja atau RKA-K/L terdapat pada kegiatan Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal pada triwulan II yakni sebesar 36,11% dari anggaran sebesar Rp.210.000.000,-.

Tabel 24. Capaian Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya							
Indikator Kinerja		Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri							
2023		2024			% Capaian		% Pertumbuhan 2023-2024	Renstra DJPB 2020-2024	
Realisasi		Target		Realisasi	Capaian				
TW II	Tahun 2023	Tahunan	TW II	TW II	terhadap target TW 2II2024	terhadap target Tahun 2024	terhadap capaian pada periode yang sama	Target 2024	% Capaian thd target akhir Renstra
-		75					-	75	

Sasaran Strategis		Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Lingkup Sekretariat Ditjen Perikanan Budi Daya									
Indikator Kinerja		Persentase Unit Pelayanan Publik (UPP) yang Melaksanakan PEKPPP Mandiri									
		Realisasi 2017-2023					2024			Renstra 2020-2024	
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Target	Realisasi	% capaian	Target 2024	% capaian 2024 thd target 2024
-	-	-	-	-	-	-	75			75	

Kegiatan yang dilakukan pada triwulan II tahun 2024 untuk mendukung pencapaian Indikator ini adalah:

1. Mengikuti Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan Publik dan PEKPPP serta Evaluasi Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kementerian dan Kelautan melalui Surat Undangan Nomor B.2485/SJ.7/TU.330/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 Tentang Undangan Bimbingan Teknis Penyusunan Standar Pelayanan dan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP),
2. KKP Mengikuti Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPSPL Pontianak, DJPKRL pada tanggal 12 – 14 Juni 2024 di BPSPL Pontianak melalui Nota Dinas Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor 2086/SJ.7/TU.210/VI/2024,
3. Mengikuti Pendampingan dan Pengisian Formulir 01 pada Sistem PEKPPP Kementerian PANRB atas Lokus UPP BPSPL Pontianak pada tanggal 19 – 21 Juni 2024 di RR. Kementerian Kelautan dan Perikanan, Gambir Jakarta Pusat sesuai dengan Undangan Kepala Pusat Data, Statistik, dan Informasi Nomor B.2493/SJ.7/TU.330/VI/2024 Tanggal 14 Juni 2024 Tentang Undangan Rapat Pendampingan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) BPSPL Pontianak,
4. Asistensi (Pendampingan) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dalam rangka pemenuhan dokumen bukti dukung sebagai berikut:
 - a. pendampingan di BLUPPB Karawang pada tanggal 4 – 7 Juni 2024,
 - b. pendampingan di BPKIL Serang pada tanggal 4 – 7 Juni 2024,

- c. pendampingan di BPBAP Ujung Batee pada tanggal 4 – 7 Juni 2024,
- d. pendampingan di BPBAP Situbondo pada tanggal 4 – 7 Juni 2024,
- e. pendampingan di BLUPPB Karawang pada tanggal 24 – 28 Juni 2024

Sampai dengan triwulan 2 tahun 2024 belum ditemukan kendala dalam upaya pencapaian IKU ini.

Rencana aksi yang akan dilakukan pada triwulan berikutnya adalah melakukan koordinasi dengan Unit Pelayanan Publik (UPP) lingkup Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya untuk melakukan PEKPPP Mandiri tahun 2024 dan *mengupload* dokumen data dukung maksimal tanggal 30 November 2024.

3.3. Akuntabilitas Keuangan

Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp.109.685.202.000,- dan telah terealisasi Rp.22.404.140.768,- atau sebesar 20,43% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan). Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu Tahun 2023, terjadi penurunan persentase realisasi belanja sebesar 5,24% dari capaian Triwulan II tahun 2024 sebesar 25,67%. Hal tersebut diakibatkan adanya *Automatic Adjustment* pada Kementerian Kelautan dan Perikanan.

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	47,324,621,000	60,610,581,000	1,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	109,685,202,000
		REALISASI	11,969,928,060 (25.29%)	10,091,298,308 (16.65%)	342,914,400 (19.60%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	22,404,140,768 (20.43%)
GRAND TOTAL		PAGU	47,324,621,000	60,610,581,000	1,750,000,000	0	0	0	0	0	0	0	109,685,202,000
		REALISASI	11,969,928,060 (25.29%)	10,091,298,308 (16.65%)	342,914,400 (19.60%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	22,404,140,768 (20.43%)
		SISA	35,354,692,940	50,519,282,692	1,407,085,600	0	0	0	0	0	0	87,281,061,232	

Gambar 10. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2024

NO	KODE NAMA KEGIATAN	KETERANGAN	JENIS BELANJA										TOTAL
			PEGAWAI	BARANG	MODAL	BEBAN BUNGA	SUBSIDI	HIBAH	BANSOS	LAINLAIN	TRANSFER		
1	2348 Dukungan Manajemen Internal Lingkup Ditjen Perikanan Budidaya	PAGU	38,848,218,000	46,051,713,000	1,495,049,000	0	0	0	0	0	0	0	86,394,980,000
		REALISASI	12,347,723,974 (31.78%)	9,667,220,820 (20.99%)	160,400,000 (10.73%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	22,175,344,794 (25.67%)
GRAND TOTAL		PAGU	38,848,218,000	46,051,713,000	1,495,049,000	0	0	0	0	0	0	0	86,394,980,000
		REALISASI	12,347,723,974 (31.78%)	9,667,220,820 (20.99%)	160,400,000 (10.73%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	0 (0.00%)	22,175,344,794 (25.67%)
		SISA	26,500,494,026	36,384,492,180	1,334,649,000	0	0	0	0	0	0	64,219,635,206	

Gambar 11. Serapan Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II Tahun 2023

BAB IV PENUTUP

Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen PK Sesditjen Perikanan Budi Daya tahun 2024 bahwa Sesditjen Perikanan Budi Daya telah melaksanakan tugas, fungsi dan misinya berdasarkan uraian pencapaian kinerja dalam BAB III. Dari hasil analisis terhadap capaian kinerja Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2024, beberapa hal yang dapat disimpulkan antara lain bahwa:

1. Alokasi anggaran APBN dilingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2024 adalah sebesar Rp.109.685.202.000,- dan telah terealisasi Rp.22.404.140.768,- atau sebesar 20,43% (sumber data aplikasi OM-SPAN Kementerian Keuangan).
2. Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Setditjen Perikanan Budi Daya Triwulan II tahun 2024 cukup baik yakni sebesar 113,81% (Nilai) (sumber data Aplikasi Kinerja KKP).

Beberapa rekomendasi atas ketercapaian target yang ditetapkan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan dan ditindaklanjuti pada tahun berikutnya adalah sebagaimana berikut:

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
1	PM SAKIP Sekretariat DJPB	<ul style="list-style-type: none">- Memperbaiki penyediaan dokumen perencanaan kinerja yang SMART, dan- Memperbaiki peningkatan kualitas SDM yang melaksanakan dan mengimplementasikan SAKIP di lingkup Setditjen Perikanan Budi Daya dengan mengadakan bimbingan teknis atau sosialisasi tata cara pengisian PM SAKIP pada aplikasi kinerja KKP.
2	Indeks Profesionalitas ASN	Akan dilakukan monitoring secara berkala dengan harapan seluruh ASN lingkup Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya dapat dinilai hasil kerja oleh pimpinan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan.
3	Nilai Rata-rata Hasil Panel Penilaian Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi (Wbk) Oleh Tim Penilai Internal KKP	Akan dilakukan koordinasi dengan UPT agar dapat mengirimkan data dukung tepat waktu.

No	Hal yang Harus Diperbaiki	Rencana Tindak Lanjut
4	Nilai Kinerja Anggaran Setditjen Perikanan Budi Daya	Melakukan pemantauan revisi anggaran baik pagu blokir dan pagu <i>automatic adjustment</i> serta revisi lembar iii dipa yang disesuaikan dengan perubahan anggaran.
5	Nilai Maturitas Struktur dan Proses Penyelenggaraan SPIP Unit DJPB	Berkoordinasi dengan inspektorat jenderal selaku penjamin kualitas SPIP lingkup KKP dalam penilaian mandiri.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PERIKANAN BUDI DAYA
JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041**